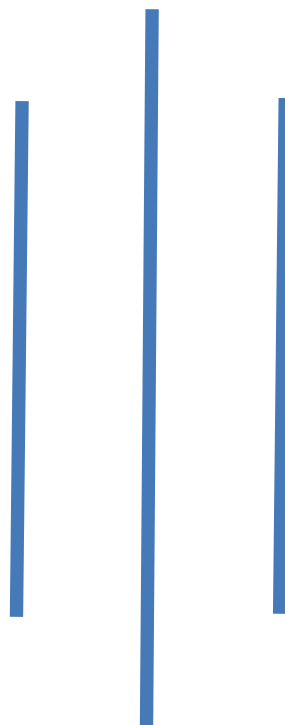




RANKHIR RENJA
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

2022

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap , terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu Tahun) untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, sedangkan Ranwal Rencana Kerja (Renja)Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Ranwal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun ke depan Ranwal Rencana Kerja (Renja)Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Demikian kami berharap dengan disusunnya Ranwal Rencana Kerja (Renja)Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selama satu tahun ke depan.

Mojokerto, Juni 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH,SH.S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	28
2.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.	37
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	74
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.	74
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	76
3.3 Program dan Kegiatan.....	78
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	111
4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	111
BAB 5 PENUTUP	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	7
Tabel 2.2 (Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	30
Tabel 2.3 (Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	38
Tabel 2.4 (Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	73
Tabel 3.1 (Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	82
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Kab. Mojokerto	112

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD , yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
16. Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
17. Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Ranwal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2023;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembangunan daerah;

Adapun tujuan disusunnya Ranwal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam jangka 1 tahun ;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan khususnya pada urusan perindustrian dan perdagangan.

Penyusunan Ranwal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan ditahun sebelumnya dan perubahan program / kegiatan di tahun sebelumnya yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja tahun 2023

Adapun tujuan disusunnya Ranwal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah untuk memasukan program / kegiatan yang terdapat di Renja kedalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat penjelasan umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini, berpedoman Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026, hasil evaluasi renja tahun 2020, serta hasil evaluasi hasil renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021. Hasil evaluasi renja tahun 2020 dan 2021 tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp.23.340.039.179, dan terealisasi sebesar Rp.15.325.135.483 atau capaian realisasi anggaran sebesar 65,66%. Sedangkan pada Tahun 2022, pelaksanaan program/kegiatan didukung dengan anggaran sebesar Rp 14.606.618.998,00,-.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 (Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Semester 1)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 %	78 %	76 (BB)	78 (BB)	100%	76 (BB)	-	-

								Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	90 %
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100 %	3 Dok	9 Dok	300 %
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	4 Dokumen	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	4 Dok	12 Dok	300 %
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	86 %	85 %	85 %	85 %	100 %	85 %	255 %	264 %
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100 %	14 bulan	42 bulan	300 %

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	65,57 %	-	-	-	-	-	-	0
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai Disperindag yang mendapatkan pakaian dinas	53 Orang	-	-	-	-	-	-	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan : Kursi kerja pejabat dan meja rapat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100 %	18 Unit	54 Unit	300 %
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Mamin yang Di Sediakan	240 Kotak	356 ktk	356 ktk	356 ktk	100 %	356 ktk	1.308 kotak	545 %

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	130.802 lbr	130.802 lbr	130.802 lbr	130.802 lbr	100 %	130.802 lbr	292.406 lbr	300 %
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	300 %
								Penyediaan Bahan / Material	Jenis ATK yang di Sediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	12 Paket	300 %
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kudapan yang Di Sediakan	175 kotak	100 kotak	100 kotak	100 kotak	100 %	175 kotak	375 kotak	214 %

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah	172 kali	172 kali	172 kali	172 kali	100 %	172 kali	516 kali	300 %
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	300 %
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan	9 Orang	9 orang	9 orang	9 orang	100 %	9 orang	27 orang	300 %

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan/Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	809 Unit	809 unit	809 unit	809 unit	100 %	809 unit	2.427 unit	300 %
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	100 %	4 Gedung	12 Gedung	300 %
								Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100 %	21 Unit	63 Unit	300 %
								PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan	93%	45%	45%	45%	50%	93%	45%	50%

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

								Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	70 Orang	70 Orang	70 orang	- 70 Orang	100%	70 Orang	70 orang	100%
								PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28,57%	28,57%	28,57%	28,57%	100%	28,57%	28,57%	100%
								Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase ketersediaan barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
								Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang di Monitoring	4 Pasar	4 Pasar	4 Pasar	4 Pasar	100%	4 Pasar	4 Pasar	100%

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

								Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang di Operasi Pasar	9 Pasar	9 Pasar	9 Pasar	9 Pasar	100%	9 Pasar	9 Pasar	100%
								PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Ekspor	15%	7,5%	7,5%	7,5%	50%	15%	7,5%	50%
								Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Satu Daerah	4 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	50%	4 Kali	2 Kali	50%
								Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah misi dagang yang diiku	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 kali	100%

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

								Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Jumlah Peserta Workshop Ekspor untuk IKM Potensial Kab. Mojokerto	25 Orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	25 Orang	25 orang	100%
								Pameran dagang nasional	Jumlah Pameran dagang nasional	2 Kali	2kali	2 kali	2 kali	100%	2 Kali	2 kali	100%
								Pembinaan pelaku usaha ekspor	jumlah pembinaan pelaku usaha ekspor	25 Orang-	-	-			25 Orang		
								PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	94%	45%	45%	45%	50%	94%	45%	50%
									Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%	5%	5%	5%	100%	5%	5%	100%

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

								Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang terdata	10 Perusahaan	10	10	10	10	100	10	10	100
								PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tingkat Pertumbuhan Industri	1%	1	1	1	1	1	100	1	100
								Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan produktivitas IKM	3%	3	3	3	3	3	100	3	100
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas Standar Produk	140 IKM	140	140	140	140	140	100	140	100
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas standarisasi produk	405 IKM	405	405	405	405	405	100	405	100

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

								PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Lapo data Industri	55%	55	55	55	55	100	55	100
								Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas	120 Indr	120	120	120	120	100	120	100
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI ,IPI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Industri yang diawasi	120 indr	120	120	120	120	100	120	100
								PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	50%	50	50	50	50	100	50	100

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

								Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	pengumpulan data industri berbasis sistem informasi	5 Kecamatan	5	5	5	5	5	100	5	100
								Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIInas)	Jumlah indsutri yang didata dan dipetakan	5 Kecamatan	5	5	5	5	5	100	5	100

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut di atas terlihat bahwa kinerja pelaksanaan renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dapat dikatakan cukup efektif dan efisien. Capaian kinerja realisasi anggaran pada Tahun 2021 adalah sebesar 65,%, sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 secara garis besar mencapai > 88 %. Berikut gambaran umum pencapaian kinerja program/kegiatan Tahun 2021 :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator persentase peningkatan pedagang yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.862.564.140 yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.862.564.140 dengan terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 81 %
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator persentase peningkatan pedagang yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 150.250.000 terdiri dari 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 100 %
- c. Program Pengembangan Ekspor dengan indikator persentase peningkatan ekspor yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 368.890.000 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 50 %

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

- d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator persentase peningkatan ekspor yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.765.180.000 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 75 %
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator persentase peningkatan pendapatan pedagang yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 435.861.860 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 100 %
- f. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator persentase peningkatan produksi & tingkat pertumbuhan industri dengan anggaran sebesar Rp. 2.395.311.634 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan pendukung dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 100 %

Sedangkan pada Tahun 2021, pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran sebesar Rp 25.903.054.600 (termasuk PAPBD 2021). Program yang dilaksanakan sebanyak 11 program dan 65 kegiatan. Dan diproyeksikan pada Tahun 2021 capaian kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat mencapai angka >80%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menghendaki terjadinya perubahan paradigma birokrasi pemerintahan dengan meningkatkan Kinerja Birokrasi dalam melayani publik secara total melalui aspek tanggung jawab. Para pengemban tugas pemerintahan dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pihak yang dilayani masyarakat.

Demikian pula bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada urusan perindustrian dan perdagangan, diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat khususnya terkait pelayanan perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Bina Usaha Perdagangan, Bina ILMATET dan Bina Industri Agro dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. BIDANG ILMATET

Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka tekstil, Alat transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri Logam dan Mesin, Industri Aneka dan Tekstil serta Industri alat transportasi, elektronika dan telematika.

2. BIDANG INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi Industri Kimia hulu dan hilir, Industri makanan minuman, dan tembakau serta industri hasil hutan dan perkebunan.

3. BIDANG USAHA PERDAGANGAN

Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi bina pasar dan distribusi, Promosi peningkatan penggunaan Produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor dan impor.

4. BIDANG METROLOGI LEGAL

Bidang Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi prasarana dan sarana metrologi legal. Pembinaan dan Penyuluhan serta pengawasan.

Indikator-indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kebijakan-kebijakan nasional yang terkait, menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan. Evaluasi atas hasil capaian kinerja pelayanan diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja tahun selanjutnya. Berikut hasil evaluasi atas capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

Tabel 2.2 (Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindag

Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PDRB katagori perdagangan	-	-	-	-	-	-			10,40%	10,41%	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021
	PDRB Katagori Industri Pengolahan									53,15%	53,16%	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021

	Persentase Angka Perdagangan Dalam Daerah (Ekspor)										5%	5%	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021
	Indeks Daya Beli										0,789%	0,789%	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021
	Persentase Industri Kecil Menengah Naik Kelas										3%	3%	Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2021

Berdasarkan tabel hasil evaluasi kinerja pelayanan tersebut, terlihat bahwa pada Tahun 2020 dan 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2020, PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan mampu memberikan kontribusi sebesar 6.94% terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto. Sedangkan pada kategori perdagangan besar, eceran, mampu memberikan kontribusi sebesar 5.95%. Nilai neraca perdagangan pada Tahun 2020 menunjukkan angka positif dimana pertumbuhan ekspor Kabupaten Mojokerto lebih tinggi dibanding impor yaitu berkisar pada angka 18.48%. Pada Bidang kemeterologian juga menunjukkan kinerja yang baik, dimana pada Tahun 2020 mampu berkontribusi sebesar 111,77 % terhadap PAD. Kinerja urusan perindustrian juga dapat dikatakan baik, dimana pada Tahun 2020 kapasitas produksi industri pengolahan meningkat sebesar 52,16.%, dengan tingkat pertumbuhan industri sebesar 1,10%.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan nasional penyusunan RPIK disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah, RTRW provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian, keseimbangan dengan kebijakan pembangunan, sosial serta daya dukung lingkungan. Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan kepada pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota untuk menyusun RPIP dan RPIK yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan kebijakan industrial nasional.

2. Masih tingginya angka impor dalam ulasannya Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan ini impor dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama adanya pelemahan rupiah terhadap dolar AS sehingga mempengaruhi peningkatan nilai impor dibanding ekspor. Pasalnya ketergantungan impor bahan baku untuk industri yang tinggi membuat harga barang lebih mahal. Namun kondisi ini tidak membuat impor dikurangi karena memang dibutuhkan. “Kedua, kenaikan impor ini akibat menjelang Ramadan dan lebaran, impor bahan pangan juga meningkat, itu sebabnya impor golongan sereal meningkat,” sebutnya. Faktor ketiga ialah peningkatan impor minyak menjelang ramadhan dan lebaran, dari sisi volume meningkat, selain itu harganya juga naik. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengaku kondisi ini tidak biasa terjadi di mana kebutuhan bahan baku dan modal meningkat. Biasanya peningkatan dua golongan itu terjadi 2 atau 3 bulan menjelang Ramadan untuk mengantisipasi kebutuhan industri saat libur panjang lebaran.
3. Revolusi Industri 4.0 memaksa agar OPD khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat memaksimalkan kinerja yang berbasis teknologi informasi. Selain itu untuk penerapan Revolusi Industri 4.0 di Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan mengadakan program e-smart IKM. Program ini berupa pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM).
4. Kebijakan nasional terkait pengembangan IKM Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM

memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2023 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2013 s.d 2023 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%. Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya persebaran pembangunan industri, serta 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan

kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.

Selain isu strategis tersebut di atas, dalam upaya pencapaian sebuah tujuan organisasi tentunya tak lepas dari beberapa permasalahan dan hambatan, baik yang berasal dari internal organisasi itu sendiri maupun berasal dari faktor eksternal. Berikut beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja:

1. Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Manajemen Modal.
3. Manajemen Pemasaran.

Isu strategis pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yang terinci sebagai berikut :

- Memberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya Clean Government dan Good Governance melalui peningkatan kinerja aparatur maka ditetapkan kebijakan meningkatkan kinerja pegawai/aparatur kearah profesional dan proporsional
- Mengembangkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Industri yang Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah Utamanya Industry Kecil Menengah (IKM) dengan Meningkatkan Kemampuan dan Penguasaan Teknologi Tepat Guna(TTG) bagi IKM melalui Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan serta Pengawasan terhadap proses serta Hasil Produksi Industry, maka ditetapkan kebijakan mendata, mengidentifikasi dan mengelompokan Potensi Produk Industry untuk Sentra Industri Kimia dan Agro (IKA) dan Sentra Industri Kimia dan Agro(IKA) Non Formal untuk diberikan pembinaan maupun bantuan alat yang lebih tepat guna
- Mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik Local, Regional, Nasional dan

Internasional, maka ditetapkan kebijakan mengadakan pengawasan untuk mengetahui barang beredar dan jasa yang ada di pasar guna meningkatkan perlindungan konsumen

- Meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representative dengan meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar maka ditetapkan kebijakan : memberikan fasilitas pasar yang layak untuk tempat bertransaksi.

1. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

1) Permasalahan dan Hambatan secara Internal terdiri atas :

- a. Sistem pendataan Industri dan Perdagangan belum sepenuhnya dilaporkan secara real time.

2) Permasalahan dan Hambatan secara Eksternal terdiri atas :

- a. Sulitnya mencari Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing
- b. Sulitnya mencari IKM yang di ajak Pelatihan dan Pembinaan SDM agar bisa berdaya saing dalam menghadapi Globalisasi.
- c. Tingginya kebijakan UMK yang berakibat pada berkurangnya jumlah industri besar.

– **Tantangan:**

- a) Tumbuhnya perekonomian yang signifikan dengan berkembangnya industrialisasi
- b) Maraknya perdagangan di Pasar-Pasar Tradisional dan Pasar Modern serta sentra-sentra perdagangan yang tersebar di Kabupaten Mojokerto
- c) Dinamisasi masyarakat segala tingkatan profesi yang semakin kualifait.
- d) Situasi politik dan keamanan kurang kondusif

- e) Perubahan kebutuhan masyarakat terhadap layanan prima semakin meningkat
- f) Meningkatnya persaingan karena belum siapnya pengusaha kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan bebas
- g) Semakin banyaknya produk-produk import menyerbu Pasar Kabupaten Mojokerto
- h) Revolusi industri yang salah satunya berkembangnya perdagangan online.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Salah satu proses yang dilakukan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 ini adalah review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, yaitu dengan membandingkan antara rencana program/kegiatan yang tercantum pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Review terhadap rancangan awal RKPD ini diperlukan guna penyesuaian antara dokumen RKPD dengan Renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 (Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023

Kabupaten Mojokerto

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto											
No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K	Disperindag	Nilai SAKIP PD	80	9,046,400,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperindag	Nilai SAKIP PD	80	9,046,400,000	

	OTA										
		Disperindag	Persentase Indikator program PD yang tercapai	90%	9,046,400,000		Disperindag	Persentase Indikator program PD yang tercapai	90%	9,046,400,000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperindag	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dok	30,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperindag	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dok	30,000,000	
	Penyusunan Dokumen	Disperindag	Jumlah Dokumen	4 Dokum	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Disperindag	Jumlah Dokumen yang Di Susun	4 Dokum	15,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Perencanaan Perangkat Daerah	dag	yang Di Susun	en	00	Daerah	dag		en	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperin dag	Jumlah Dokumen yang Di Susun	3 Dokumen	15,000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperin dag	Jumlah Dokumen yang Di Susun	3 Dokumen	15,000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperin dag	Persentase Realisasi Anggaran PD	91%	7,715,000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperin dag	Persentase Realisasi Anggaran PD	91%	7,715,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperin dag	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji	49 Orang	7,700,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperin dag	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji	49 Orang	7,700,000,000	
	Penyediaan Administrasi	Disperin	Jumlah laporan	12 Lapora	15,000,0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disperin	Jumlah laporan yang Di Susun	12 Lapora	15,000,00	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Pelaksanaan Tugas ASN	dag	yang Di Susun	n	00		dag		n	0	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperindag	IP ASN Perangkat Daerah	76%	110,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperindag	IP ASN Perangkat Daerah	76%	110,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Disperindag	Jumlah Pakaian Dinas pegawai	58 stel	20,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Disperindag	Jumlah Pakaian Dinas pegawai	58 stel	20,000,000	
	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Se-Kab Mojokerto	Jumlah kegiatan monitoring pegawai	12 kegiatan	15,000,000	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Se-Kab Mojokerto	Jumlah kegiatan monitoring pegawai	12 kegiatan	15,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperindag	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan	1 kegiatan	25,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperindag	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan	1 kegiatan	25,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undang	Disperindag	Jumlah Pedagang yang mengikuti sosialisasi/Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	165 Pegawai	50,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang - undang	Disperindag	Jumlah Pedagang yang mengikuti sosialisasi/Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	165 Pegawai	50,000,000	
	0		0	0%		0		0	0%		

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Disperindag			-		Disperindag			-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperindag	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	324,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperindag	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	324,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperindag	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Unit	80,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperindag	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Unit	80,000,000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperindag	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	300 Kotak	27,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperindag	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	300 Kotak	27,500,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperindag	Jumlah jenis barang yang dicetak & digandakan	2 jenis	40,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperindag	Jumlah jenis barang yang dicetak & digandakan	2 jenis	40,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Disperindag	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	4 Paket	30,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Disperindag	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	4 Paket	30,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperindag	Jumlah makan minum	1 Paket	30,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperindag	Jumlah makan minum yang diadakan	1 Paket	30,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

			yang diadakan								
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Se-Kab Mojokerto	Jumlah waktu Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 bulan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Se-Kab Mojokerto	Jumlah waktu Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 bulan	100,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Disperindag	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan	12 Bulan	16,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Disperindag	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan	16,500,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

			peraturan perundang - undangan								
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	495,600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	495,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperindag	Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi,	12 Bulan	357,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperindag	Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	357000000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

			sumber daya air dan listrik								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperindag	Jumlah Penyediaan jasa tenaga kerja	9 Orang	138,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperindag	Jumlah Penyediaan jasa tenaga kerja	9 Orang	138,600,000	
6	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperindag	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	151,800,000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperindag	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	151,800,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Disperindag	Jumlah pajak kendaraan	18 Unit	55,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Disperindag	Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas	18 Unit	55,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau kendaraan dinas jabatan			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Disperindag	Jumlah pajak kendaraan dinas /operasional yang terbayar	18 Unit	19,800,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperindag	Jumlah pajak kendaraan dinas /operasional yang terbayar	18 Unit	19,800,000		

	Operasional atau Lapangan										
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	2 Gedung	55,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	2 Gedung	55,000,000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Disperindag	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung	20 Unit	22,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	20 Unit	22,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Bangunan Lainnya		Kantor								
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperindag	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	220,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperindag	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	220,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	2 Jenis	20,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	2 Jenis	20,000,000	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah gedung yang dibangun	1 gedung	200,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperindag	Jumlah gedung yang dibangun	1 gedung	200,000,000	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperindag	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terstandar	93%	6,661,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperindag	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terstandar	93%	6,661,000,000	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	persentase sarana distribusi perdagangan yang terbangun	93%	5,470,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	persentase sarana distribusi perdagangan yang terbangun dan terkelola	93%	5,470,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

			dan terkelola								
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	1 Paket	4,000,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	1 Paket	4,000,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	persentase sarana distribusi perdagangan dengan konstruksi baik	100%	1,470,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	persentase sarana distribusi perdagangan dengan konstruksi baik	100%	1,470,000,000	

2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Se-Kab Mojokerto	Persentase SDM pengelola sarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100%	1,191,000,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Se-Kab Mojokerto	Persentase SDM pengelola sarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100%	1,191,000,000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pasar yang dikelola	10 pasar	1,191,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pasar yang dikelola	10 pasar	1,191,000,000	

II	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Se-Kab Mojokerto	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29%	165,275,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Se-Kab Mojokerto	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29%	165,275,000	
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah	Se-Kab Mojokerto	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok	29%	165,275,000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Se-Kab Mojokerto	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok	29%	165,275,000	

	Kabupaten/ Kota										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pasar yang dimonitoring terkait dengan pelaporan sembako	9 Pasar	55,088,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pasar yang dimonitoring terkait dengan pelaporan sembako	9 Pasar	55,088,000	
	Pengendalian Ketersediaan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pasar yang	9 Pasar	110,187,	Pengendalian Ketersediaan Barang	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pasar yang di Operasi Pasar	9 Pasar	110,187,0	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	to	di Operasi Pasar		000	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	o			00	
I V	PROGRAM PENGEMBAN GAN EKSPOR	Se-Kab Mojoker to	Persentase Pertumbuh an Ekspor	5%	404,000, 000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Se-Kab Mojokert o	Persentase Pertumbuhan Ekspor	5%	404,000,0 00	
1	Penyelenggara an Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Se-Kab Mojoker to	Persentase pertumbuh an IKM potensi Ekspor	33%	404,000, 000	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Se-Kab Mojokert o	Persentase pertumbuhan IKM potensi Ekspor	33%	404,000,0 00	

yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah misi dagang yang diikuti	2 Kali	100,000,000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Se-Kab Mojokerto	Jumlah misi dagang yang diikuti	2 Kali	100,000,000		
Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Peserta Workshop Ekspor untuk IKM Potensial Kab. Mojokerto	25 Orang	140,000,000	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Peserta Workshop Ekspor untuk IKM Potensial Kab. Mojokerto	25 Orang	140,000,000		

	Pameran dagang nasional	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pameran dagang nasional	2 Kali	140,000,000	Pameran dagang nasional	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pameran dagang nasional	2 Kali	140,000,000	
	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Se-Kab Mojokerto	jumlah pembinaan pelaku usaha ekspor	25 Orang	24,000,000	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Se-Kab Mojokerto	jumlah pembinaan pelaku usaha ekspor	25 Orang	24,000,000	
V	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Se-Kab Mojokerto	Persentase alat UTTP yang ditera/teraulang dalam tahun berjalan	94%	1,825,030,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Se-Kab Mojokerto	Persentase alat UTTP yang ditera/teraulang dalam tahun berjalan	94%	1,825,030,000	

			Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%				Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%		
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Se-Kab Mojokerto	Persentase wajib tera yang terlayani/ indeks kepuasan terhadap pelayanan tera dan	94,37%	1,825,030,000	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Se-Kab Mojokerto	Persentase wajib tera yang terlayani/ indeks kepuasan terhadap pelayanan tera dan tera ulang	94,37%	1,825,030,000	

			tera ulang								
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Se-Kab Mojokerto	Jumlah alat pendukung pelayanan UTTP	1 Ruang Lingkup	1,129,536,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Se-Kab Mojokerto	Jumlah alat pendukung pelayanan UTTP	1 Ruang Lingkup	1,129,536,000	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Alat UTTP yang belum dan yang sudah ditera	56.000 UTTP	645,494,000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Alat UTTP yang belum dan yang sudah ditera	56.000 UTTP	645,494,000	
	Penyidikan Metrologi Legal	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Obyek penyidikan metrologi	2 Obyek	50,000,000	Penyidikan Metrologi Legal	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Obyek penyidikan metrologi legal	2 Obyek	50,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

			legal								
V	PROGRAM PENGUNAA N DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperin dag	Persentase UMKM yang berkembangan g omzetnya	60%	690,000, 000	PROGRAM PENGUNAAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperin dag	Persentase UMKM yang berkembang omzetnya	60%	690,000,0 00	
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Se-Kab Mojokerto	Presentase UMKM yang berkembangan g Omsetnya	60%	690,000, 000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Se-Kab Mojokerto	Presentase UMKM yang berkembang Omsetnya	60%	690,000,0 00	

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Promosi Potensi Daerah yang diikuti	4 Kali	350,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Promosi Potensi Daerah yang diikuti	4 Kali	350,000,000	
Pembinaan terhadap pedagang / pelaku usaha produk dalam negeri	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	4 Kali	120,000,000	Pembinaan terhadap pedagang / pelaku usaha produk dalam negeri	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	4 Kali	120,000,000	
Peningkatan Sistim dan	Disperindag	Jumlah UMKM	140 UMKM	120,000,000	Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi	Disperindag	Jumlah UMKM yang terdata dalam sistim	140 UMKM	120,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Jaringan Informasi Perdagangan		yang terdata dalam sistim		000	Perdagangan				00	
V II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperindag	Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen	15%	20,000,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperindag	Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen	15%	20,000,000	
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat,	Disperindag	Persentase Penerbitan Tanda Daftar	15%	10,000,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin	Disperindag	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15%	10,000,000	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Gudang			Usaha Toko Swalayan					
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan	Disperindag	Jumlah Toko Modern yang terdata	12 toko modern	10,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Disperindag	Jumlah Toko Modern yang terdata	12 toko modern	10,000,000	

	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperindag	Jumlah TDG yang diterbitkan	13 Perusahaan	10,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperindag	Jumlah TDG yang diterbitkan	13 Perusahaan	10,000,000	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperindag	Jumlah perusahaan yang terdata	13 Perusahaan	10,000,000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperindag	Jumlah perusahaan yang terdata	13 Perusahaan	10,000,000	
V II I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperindag	Tingkat Pertumbuhan Industri	2%	1,225,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperindag	Tingkat Pertumbuhan Industri	2%	1,225,000,000	

1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperindag	persentase peningkatan produktivitas IKM	2%	1,225,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperindag	persentase peningkatan produktivitas IKM	2%	1,225,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Se-Kab Mojokerto	Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas Standar Produk	200 IKM	250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Se-Kab Mojokerto	Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas Standar Produk	200 IKM	250,000,000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Se-Kab Mojokerto	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas standarisasi produk	450 ikm	975,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Se-Kab Mojokerto	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas standarisasi produk	450 ikm	975,000,000	
I X	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Disperindag	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laporan data Industri	55%	118,862,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Disperindag	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laporan data Industri	55%	118,862,000	

1	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Se-Kab Mojokerto	Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas	55%	118,862,000	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Se-Kab Mojokerto	Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas	55%	118,862,000	
---	---	------------------	---	-----	-------------	---	------------------	---	-----	-------------	--

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI ,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Industri yang diawasi	120 indr	118,862,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI ,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Se-Kab Mojokerto	Jumlah Industri yang diawasi	120 indr	118,862,000	
--	-------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------	--

X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperindag	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	50%	220,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperindag	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	50%	220,000,000	
1	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Disperindag	Prosentase pengumpulan data industri berbasis sistem informasi	50%	220,000,000	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Disperindag	Prosentase pengumpulan data industri berbasis sistem informasi	50%	220,000,000	

Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	Se-Kab Mojokerto	Jumlah industri yang didata dan dipetakan	5 kecamatan	220,000,000	Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	Se-Kab Mojokerto	Jumlah indsutri yang didata dan dipetakan	5 kecamatan	220,000,000	
Total		Total								

			20,375,5			20,375,56	
			67,000			7,000	

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rekapitulasi perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , terdapat kebutuhan , dimana dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 9.046.400.000
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dimana dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.661.000.000
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dimana dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 165.275.000
4. Program Pengembangan Ekspor dimana dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 404.000.000
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen juga membutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.825.030.000
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 690.000.000
7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.225.000.000
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 118.862.000
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 220.000.000

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 3 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2023 :

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2023 Kabupaten Mojokerto

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari masyarakat dan dunia usaha.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Didalam pembangunan sektor industri terdapat permasalahan permasalahan didalamnya baik masalah internal yaitu masalah di dalam sektor industri itu sendiri maupun masalah eksternal yaitu masalah diluar sektor industri.

Masalah industri tersebut antara lain kurang kuatnya populasi industri baik besar maupun sedang, menyangkut struktur industri nasional dan masalah produktivitas yaitu kurangnya tenaga kerja di industri dalam menciptakan nilai tambah industri.

Sementara itu, permasalahan eksternal industri mencakup (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai; (2) tidak ada pengawasan terhadap produk import terutama produk import ilegal di pasar domestik; (3) hubungan industrial dan tenaga kerja dimasing sektor industri belum terbangun dengan baik; (4) suku bunga perbankan yang masih tinggi.

Disamping permasalahan tersebut, industri nasional menghadapi tantangan dari produk-produk luar negeri yang semakin bebas masuk ke pasar domestik. Untuk itu diperlakukan upaya menyeluruh untuk mengamankan pasaran dalam negeri dari serbuan produk-produk yang illegal dan yang tidak memenuhi standar, seta upaya untuk membantu industri nasional meningkatkan daya saingnya baik dari segi harga maupun kualitas.

Peran ekspor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diupayakan untuk terus meningkat, terutama ekspor nonmigas. Oleh sebab itu, untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas dilakukan melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Namun demikian, Kebijakan Perdagangan Luar negeri tersebut akan didukung pula oleh penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah *roadmap* (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industry 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi. Untuk itu, sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era Industry 4.0. Adapun lima teknologi utama yang menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human–Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Langkah dasar yang sudah diawali oleh Indonesia, yakni meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program *link and match* antara pendidikan dengan industri. Upaya ini dilaksanakan secara sinergi antara Kemenperin dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Salah satu strategi Indonesia memasuki Industry 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air. Adapun kelima sektor tersebut, yaitu Industri Makanan dan Minuman, Industri Otomotif, Industri Elektronik, Industri Kimia, serta Industri Tekstil.

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud.

Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi

penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2022 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan adalah. sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 khususnya pada misi kedua yaitu ***Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan***

Dengan mengacu pada sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini adalah meningkatnya kemandirian keuangan daerah sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu 2021 – 2026, serta dengan memperhatikan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan, maka ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah.

- a. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi .
- b. Meningkatkan PDRB Perindustrian dan Perdagangan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran triwulan atau bulanan. Adapun Tabel Sasaran dan Tabel Program dalam Ranwal Renja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja TA. 2023
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	%Angka Perdagangan Dalam Daerah (Ekspor)	5%
2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,789 %
3	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Persentase IKM yang naik kelas	3%

Tabel Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terstandar	93%
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29%
4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	5%
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTP yang ditera – tera ulang dalam tahun berjalan	94%
		Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5%
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang berkembang omzetnya	60%
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen	15%
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingkat Pertumbuhan Industri	2%

9	Program Pengendalian dan Izin Usaha Industri	Tingkat Kepatuhan Industri untuk tertib lapor data industri	55%
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	50%

3.3 Program dan Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota oleh Sekretariat, dan pada Tahun 2023 didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini, telah sesuai dengan Renstra Disperindag Tahun 2021 – 2026 dan SKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Pada dokumen RKPD pagu indikatif yang ditetapkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 9.046.400.000.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini merupakan salah satu program prioritas untuk mendukung sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, pencapaian indikator sasaran persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terstandar. Program ini merupakan program yang baru dilaksanakan pada Tahun 2023, sebagai salah satu wujud upaya efektifitas program agar kinerjanya lebih optimal. Program Peningkatan Distribusi Perdagangan pada tahun 2023 didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

1. Pembangunan dan Pngelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ini, telah sesuai (jika sesuai) dengan Renstra Disperindag Tahun 2021 – 2026 dan SKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Pada dokumen RKPD pagu indikatif yang ditetapkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 6.661.000.000

3. Program Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp. 165.275.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indikator sasaran Tingkat Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan harga penting yang meliputi & didukung 1 kegiatan yaitu:

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat daerah kabupaten/kota

4. Program Pengembangan Ekspor

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp. 404.000.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Pertumbuhan Ekspor yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp.1. 825.030.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Persentase alat UTP yang ditera – tera ulang dalam tahun berjalan yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera – Tera Ulang dan Pengawasan

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp. 690.000.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Persentase UMKM yang berkembang Omzetnya yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Promosi , Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp. 20.000.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang memiliki Fasilitasi pemenuhan komitmen yang meliputi & didukung 2 Kegiatan yaitu :

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan izin usaha took swalayan
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang

8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp.1. 225.000.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Pertumbuhan Industri yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp.118.862.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Lapor Data Industri yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI), Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini merupakan salah satu prioritas dengan anggaran Rp.220.000.000 untuk mendukung sasaran pemerintah dengan indicator sasaran Tingkat Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini yang meliputi & didukung 1 Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI Kewenangan Kab/Kota Secara lebih rinci, rencana program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 (Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Mojokerto

NAMA PD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	80 (B)	8,966,538,996	APBD		80 (B)	9,863,192,896
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		90%	20,000,000	APBD		90%	22,000,000
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	10,000,000	APBD		4 Dokumen	11,000,000

3.30.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	10,000,000	APBD		1 Laporan	11,000,000
3.30.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90%	7,001,538,000	APBD		90%	7,701,691,800
3.30.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		56 Orang	7,001,538,000	APBD		56 Orang	7,701,691,800
3.30.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	232,000,000	APBD		90%	255,200,000
3.30.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	50,000,000	APBD		2 Paket	55,000,000
3.30.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		36 Paket	25,000,000	APBD		36 Paket	27,500,000
3.30.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		36 Paket	40,000,000	APBD		36 Paket	44,000,000
3.30.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	10,000,000			12 Dokumen	11,000,000
3.30.01.2.0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket		2 Paket		APBD		2 Paket	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

6.07		Bahan/Material yang Disediakan			32,000,000				35,200,000
3.30.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	12 Laporan	25,000,000	APBD		12 Laporan	27,500,000
3.30.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		260 Laporan	50,000,000	APBD		260 Laporan	55,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		73%	910,000,996	APBD		73%	1,001,001,095.60
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		1300 Orang	850,000,996	DBHCH T		1300 Orang	935,001,096
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	20,000,000	APBD		1 Paket	22,000,000
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	15,000,000	APBD		1 Dokumen	16,500,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		4 Orang	25,000,000	APBD		4 Orang	27,500,000
3.30.01.2.0	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Penyediaan		90%		APBD		90%	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

8	Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan			470,000,000				517,000,000
3.30.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	344,000,000	APBD		12 Laporan	378,400,000
3.30.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		108 Laporan	126,000,000	APBD		108 Laporan	138,600,000
3.30.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam keadaan baik		90%	118,000,000	APBD		90%	129,800,000
3.30.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		27 Unit	68,000,000	APBD		27 Unit	74,800,000
3.30.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /rehabilitasi		1 Unit	50,000,000			1 Unit	55,000,000
3.30.01.2.0	Pengadaan Barang Milik	Persentase Pengadaan	Kantor	100%		APBD		100%	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

7	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto		215,000,000				236,500,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 Unit	195,000,000	APBD		1 Unit	214,500,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 Unit	20,000,000	APBD		1 Unit	22,000,000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terstandar		92.86%	3,715,000,000	APBD		92.86%	4,086,500,000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarana distribusi perdagangan yang terbangun dan terkelola		85,71%	3,015,000,000	APBD		85,71%	3,316,500,000
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		1 Unit	1,870,000,000	APBD		1 Unit	2,057,000,000
	Rincian :								
	Pembangunan Pasar Rakyat Mojosari	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun		1 Lokasi	1,870,000,000	APBD		1 Lokasi	2,057,000,000
3.30.03.2.0	Fasilitasi Pengelolaan Sarana	Jumlah Fasilitasi		14 Unit		APBD		14 Unit	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

1.02	Distribusi Perdagangan	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1,145,000,000				1,259,500,000
	Rincian :								
	Pemeliharaan Kebersihan Pasar	Jumlah Pasar yang dibersihkan		12 Pasar	900,000,000	APBD		12 Pasar	990,000,000
	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Sehat	Jumlah pedagang yang dibina		12 Pasar	100,000,000	APBD		12 Pasar	110,000,000
	Operasionalisasi Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST)	Jumlah Waktu Operasionla PPST		12 Bulan	30,000,000	APBD		12 Bulan	33,000,000
	Operasional UPT Pasar	Jumlah operasional UPT Pasar		12 Bulan	115,000,000	APBD		12 Bulan	126,500,000
3.30.03.2.0 2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase SDM pengelola sarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi		100%	700,000,000	APBD		100%	770,000,000
3.30.03.2.0 2.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen	700,000,000	APBD		1 Dokumen	770,000,000
	Rincian :								
	Pembinaan Pegawai Pengelola Pasar Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai Pengelola Pasar yang dibina		70 Orang	700,000,000			70 Orang	770,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		29.00%	100,080,000	APBD		29.00%	110,088,000
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase ketersediaan barang kebutuhan pokok		29.00%	100,080,000	APBD		29.00%	110,088,000
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		9 Laporan	50,080,000	APBD		9 Laporan	55,088,000
	Rincian :								
	Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Sembako	Jumlah Pasar yang di Monitoring terkait dengan pelaporan sembako		9 Pasar	50,080,000	APBD		9 Pasar	55,088,000
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		9 Laporan	50,000,000	APBD		9 Laporan	55,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Rincian :								
	Operasi Pasar	Jumlah Pasar yang dimonitoring terkait dengan pelaporan sembako		9 Pasar	50,000,000	APBD		9 Pasar	55,000,000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Ekspor		5%	70,000,000	APBD		5%	77,000,000
3.30.05.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pertumbuhan IKM potensi ekspor		33%	70,000,000	APBD		33%	77,000,000
3.30.05.2.0 1.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam misi dagang Produk Ekspor Unggulan		2 Pelaku Usaha	60,000,000	APBD		2 Pelaku Usaha	66,000,000
	Rincian :								
	Pengembangan perdagangan antar daerah bagi produk ekspor	peningkatan volume ekspor dengan mengikuti misi dagang antar daerah		2 Pelaku Usaha	60,000,000	APBD		2 Pelaku Usaha	66,000,000
3.30.05.2.0 1.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina		10 Pelaku Usaha	10,000,000	APBD		10 Pelaku Usaha	11,000,000
	Rincian :								

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	monitoring, pembinaan dan inventarisasi pelaku ekspor diwilayah kabupaten mojokerto	monitoring, pembinaan & inventarisasi bagi pelaku ekspor kab. Mojokerto sehingga tersedia data tentang pelaku ekspor & produk yang diekspor serta negara tujuan ekspor		10 Pelaku Usaha	10,000,000	APBD		10 Pelaku Usaha	11,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		94%	645,000,000	APBD		94%	709,500,000
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		5.00%				5.00%	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase wajib tera yang terlayani/ indeks kepuasan terhadap pelayanan tera dan tera ulang		94,37%	645,000,000	APBD		94,37%	709,500,000
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat Ukur,Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		25.000 Unit	477,000,000	APBD		25.000 Unit	524,700,000
	Rincian :								
	Operasional Tera/tera Ulang	memberikan perlindungan		54623		APBD		54623	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	UTTP	kepada konsumen terhadap kevalidan hasil ukur, takar, timbang		unit	230,000,000			unit	253,000,000
	Pemeliharaan renovasi dan pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah gedung UPT Metrologi legal yang dipelihara dengan baik		1 Gedung		APBD		1 Gedung	
	Dukungan Surveillance (Assesi)	Lolos dalam Audit oleh Kemendag dan ISO 9001:2015		1 Kali	57,000,000	APBD		1 Kali	62,700,000
	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemetrolgian	Meningkatnya Kualitas SDM Kemetrolgian		14 Pegawai	190,000,000	APBD		14 Pegawai	209,000,000
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		600 Pelaku Usaha	160,000,000	APBD		600 Pelaku Usaha	176,000,000
	Rincian :								
	Pendataan / Pemetaan Data Potensi dan Kondisi UTTP dan BDKT	Menyediakan data potensi dan kondisi alat ukur takar timbang dan perlengkapannya di wilayah kabupaten mojokerto		18 kec	50,000,000	APBD		18 kec	55,000,000
	Operasional Pengawasan UTTP	Menciptakan tertib ukur dan perlindungan konsumen		18 kec	40,000,000	APBD		18 kec	44,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Penyuluhan kemetrolgian melalui tatap muka, medis cetak, elektronika, internet	meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah tentang kemetrolgian sehingga taat melaksanakan tera - tera ulang alat UTTP		19 lokasi (18 kec dan 1 kawasan NIP)	30,000,000	APBD		19 lokasi (18 kec dan 1 kawasan NIP)	33,000,000
	operasional pengawasan BDKT	Menciptakan peredaran barang BDKT sesuai ketentuan Undang - undang		9 Jenis BDKT	30,000,000	APBD		9 Jenis BDKT	33,000,000
	Pembelian sampling BDKT	Agar mengetahui Legalitas BDKT, Kebenaran labelitas BDKT, Berat/ berat jenis BDKT		9 Jenis BDKT	5,000,000	APBD		9 Jenis BDKT	5,500,000
	Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja pengawasan	Menciptakan Kinerja Pengawasan berjalan lancar		2 alat Standar UTTP	5,000,000	APBD		2 alat Standar UTTP	5,500,000
3 30 06 2.01 03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal		1 Unit	8,000,000	APBD		1 Unit	8,800,000
	Rincian :								
	Operasionalisasi Penegakan Hukum	Proses pelimpahan perkara hasil pelanggaran pengawasan,		1 Kasus	8,000,000	APBD		1 Kasus	8,800,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		terlaksananya pengawasan terhadap peraturan kemetrolagian							
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase UMKM yang berkembang omzetnya		60%	45,000,000	APBD		60%	49,500,000
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Presentase UMKM yang berkembang Omsetnya		60.00%	45,000,000	APBD		60.00%	49,500,000
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		8 UMKM	45,000,000	APBD		8 UMKM	49,500,000
	Rincian :								
	Promosi Potensi Daerah	Jumlah Promosi potensi daerah yang diikuti		4 Kali	45,000,000			4 Kali	49,500,000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen		15%	10,000,000			15%	11,000,000
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang		15%	10,000,000			15%	11,000,000
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		8 Dokumen	10,000,000			8 Dokum	11,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

								en	
	Rincian :								
	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perijinan tanda daftar gudang	jumlah tnda daftar gudang yang difasilitasi berupa produk BAP (Berita acara pemeriksaan)		8 perusahaan	10,000,000			8 perusahaan	11,000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tingkat Pertumbuhan Industri		1.50%	900,000,000	APBD		1.50%	990,000,000
3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan produktivitas IKM		2.00%	900,000,000	APBD		2.00%	990,000,000
3.31.02.2.0 1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	110,000,000
	Rincian :								22,000,000
	Sosialisasi penerapan industri hijau bagi industri	Jumlah Industri yang mengikuti sosialisasi		15 Perusahaan	20,000,000	APBD		15 Perusahaan	22,000,000
	Fasilitasi pendaftaran merk produk industri aneka dan tekstil	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pendaftaran merk produk		30 IKM	30,000,000	APBD		30 IKM	33,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		industri aneka dan tekstil							
	Fasilitasi standarisasi produk IKM Agrokim	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi produk IKM Agrokim		35 IKM	50,000,000	APBDP rov		35 IKM	55,000,000
3.31.02.2.0 1.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		4 Dokumen	800,000,000	APBD		4 Dokum en	880,000,000
	Rincian :								
	Bimbingan Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan IKM	Jumlah IKM yang mendapat bimbingan		25 IKM	85,000,000	APBD		25 IKM	93,500,000
	Kajian Pembentukan KIHT di Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen yang tersusun		1 Dokumen	200,000,000	DBHCH T		1 Dokum en	220,000,000
	Pembinaan Pengusaha hasil tembakau di kab. Mojokerto	Jumlah Pengusaha Tembakau yang mendapatkan Pembinaan		40 Orang	50,000,000	APBD		40 Orang	55,000,000
	Desiminasi standarisasi Produk Industri Agro Kimia	Jumlah IKM yang mengikuti desiminasi		70 Orang	50,000,000	APBD		70 Orang	55,000,000
	Pendampingan	Jumlah IKM yang		15 IKM		APBD		15 IKM	

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Pengembangan usaha industri bagi Industri kecil dalam rangka IKM naik kelas berlegalitas				100,000,000				110,000,000
	Pembinaan, pelatihan dan pendampingan servis elektronik yang terampil & terpercaya secara online	Jumlah IKM yang dibina		20 IKM	50,000,000	APBD		20 IKM	55,000,000
	Pelatihan bimbingan manajemen usaha industri bagi IKM kuningan,perak & monel	Jumlah IKM yang dibina		30 IKM	40,000,000	APBD		30 IKM	44,000,000
	Pembinaan, pelatihan dan pendampingan trend batik khas mojokerto & ecoprint	Jumlah IKM yang dibina		20 IKM	50,000,000	APBD		20 IKM	55,000,000
	Pembinaan, pelatihan dan kemasan produk IKM bagi aneka dan tekstil	Jumlah IKM yang dibina		30 IKM	60,000,000	APBD		30 IKM	66,000,000
	Pembinaan dan pelatihan teknik Pemotretan barang hasil produksi editing foto, fidio yang berkualitas dan pemasaran online	Junlah IKM yang dibina		30 IKM	40,000,000	APBD		30 IKM	44,000,000
	Pembinaan Industri kecil hasil hutan	Jumlah IKM yang dibina		20 IKM	75,000,000	APBD		20 IKM	82,500,000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib		55%	70,000,000	APBD		55%	77,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Lapor data Industri							
3.31.03.2.0 1	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas		55%	70,000,000	APBD		55%	77,000,000
3.31.03.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI ,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasab Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perzinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	70,000,000	APBD		1 Dokum en	77,000,000
	Rincian :								
	Pengawasan dan Pembinaan IKM di Wilayah Kabupaten Mojokerto	Jumlah pengawasan & pembinaan ke industri		70 Industri	70,000,000	APBD		70 Industri	77,000,000

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		50%	85,000,000	APBD		50%	93,500,000
	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Prosentase pengumpulan data industri berbasis sistem informasi		50%	85,000,000	APBD		50%	93,500,000
	Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sisem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	85,000,000	APBD		1 Dokumen	93,500,000
	Rincian :								
	Upditing data industri Kabupaten Mojokerto	Jumlah industri yang terdata		4000 Industri	85,000,000	APBD		4000 Industri	93,500,000
JUMLAH									
					14,606,618,996				16,067,280,896

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023, mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021- 2026 serta mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, dan hasil penelaahan usulan masyarakat/pemangku kepentingan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD 2023.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp 14.316.618.996,-**(Empatbelas milyar Tigaratus Enambelas Juta Enamratus Delapanbelas Ribu Sembilanratus sembilanpuluh enam Rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Kab. Mojokerto

MATRIK RENCANA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2023

KODE SKPD		3.06.01													
NAMA SKPD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN													
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN			KET
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	-		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (B)		8,706,538,996		0.00		0.00	-	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	90%	Disperindag	15,000,000						
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Disperindag	7,500,000						
		Rincian :													
		Penyusunan Renja & P- Renja					4 dokumen		7,500,000						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Disperindag	7,500,000						
		Rincian :							0						

		Penyusunan Evaluasi Renja (Triwulan), LKJIP, LKPJ, LPPD, SAKIP				1 Laporan		7,500,000						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%		7,001,538,000						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan		7,001,538,000						
		Rincian :						0						
		Gaji dan Tunjangan PNS				55 Orang/Bulan		7,001,538,000						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73%		875,000,996						
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Disperindag							
		Rincian :												
		Belanja Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya				1 Paket								

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen								
		Rincian :												
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen								
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		25,000,000						
		Rincian :												
		Pendidikan dan Pelatihan Tematik Disperindag			Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tematik	4 Orang		25,000,000						
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1300 Orang		850,000,996						
		Rincian :												
		DBHCHT - Cukai Bidang Penegakan Hukum						850,000,996						DBHCHT

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90.00%		227,000,000						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		50,000,000						
		Rincian :												
		Beli Lemari Filling Kabinet dan PC komputer				PC 2 unit; Lemari 6 unit		50,000,000						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket		25,000,000						
		Rincian :												
		Makan minum rapat						25,000,000						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket		40,000,000						
		Rincian :												
		Cetak map, amplop, blanko & lembar disposisi						40,000,000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		5,000,000						
		Rincian :												
		Beli Koran				12 Dokumen		5,000,000						
		Penyediaan Bahan / Material			Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	2 Paket		32,000,000						
		Rincian :												
		Beli ATK				2 Paket		32,000,000						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		25,000,000						
		Rincian :												
		Makan minum Tamu				12 Laporan		25,000,000						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan		50,000,000						
		Rincian :												

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Perjalanan dinas luar dan dalam daerah				260 Laporan		50,000,000						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	90.00%								
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit								
		Rincian :												
		Pembangunan Ruang Rapat Kantor				1 Unit								PAK 2022
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit								
		Rincian :												
		CCTV satu set												PAK 2022

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit								
		Rincian :												
		Meja & Kursi				1 Unit								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	90.00%		470,000,000						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		344,000,000						
		Rincian :												
		Biaya Listrik				12 Laporan		344,000,000						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan		126,000,000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Rincian :												
		Honor Tenaga Harian Lepas (THL)				9 Orang		126,000,000						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	90.00%		118,000,000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		68,000,000						
		Rincian :												
		Pembayaran STNK				27 Unit		18,000,000						
		Pemeliharaan, Service, Pembelian BBM				27 Unit		50,000,000						
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit		50,000,000						
		Rincian :												
		Rehab gedung kantor				1 Unit		50,000,000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang Memiliki Fasilitas Pemenuhan Komitmen	15.00%		10,000,000					
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang				Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15%		10,000,000					
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8 Dokumen		10,000,000					
		Rincian :												
		Pengawasan dan Pembinaan Gudang di Wilayah Kabupaten Mojokerto				Jumlah pengawasan dan pembinaan gudang di wilayah kabupaten Mojokerto	8 Perusahaan		10,000,000					
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terstandar	93.00%		3,715,000,000					
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terbangun dan Terkelola	85.71%		3,015,000,000					
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit		1,870,000,000					

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Rincian :												
		Relokasi Pedagang Pasar Raya Mojosari			Jumlah Pasar yang direlokasi	1 Pasar		1,870,000,000						
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14 Unit		1,145,000,000						
		Rincian :												
		Pemeliharaan Kebersihan Pasar			Jumlah Pasar yang dibersihkan	14 Pasar		900,000,000						
		Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Sehat			Jumlah Pasar yang Dipelihara Sarana dan Prasarana Representatif nya	3 pasar		100,000,000						
		Operasionalisasi Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST)			Jumlah Waktu Operasional PPST	12 Bulan		30,000,000						
		Operasional UPT Pasar			Jumlah operasional UPT Pasar	12 Bulan		115,000,000						
		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			Persentase SDM Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi	100.00%		700,000,000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen		700,000,000						
		Rincian :												
		Peningkatan Pengelolaan Pasar			Jumlah Pasar yang dikelolah	14 Pasar		700,000,000						
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29.00%		100,080,000						
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	29.00%		100,080,000						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	9 Laporan		50,080,000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Rincian :												
		Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Sembako			Jumlah Pasar yang di Monitoring terkait dengan pelaporan sembako	9 Pasar		50,080,000						
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	9 Laporan		50,000,000						
		Rincian :												
		Operasi Pasar			Jumlah Pasar yang dimonitoring terkait dengan pelaporan sembako	2 Kali		50,000,000						
		Program Pengembangan Ekspor			Persentase Pertumbuhan Ekspor	5.00%		70,000,000						
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Persentase Pertumbuhan IKM Potensi Ekspor	33.00%		70,000,000						
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten / Kota			Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	-								

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Rincian :												
		Pameran Dagang Nasional			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-								
		Rincian :												
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha		60,000,000						
		Rincian :												
		Pengembangan perdagangan antar daerah bagi produk ekspor			Jumlah misi dagang yang diikuti	2 Kali		60,000,000						
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10 Pelaku Usaha		10,000,000						
		Rincian :												

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		monitoring, pembinaan dan inventarisasi pelaku ekspor diwilayah kabupaten mojokerto			monitoring, pembinaan & inventarisasi bagi pelaku ekspor kab. Mojokerto sehingga tersedia data tentang pelaku ekspor & produk yang diekspor serta negara tujuan ekspor	10 Pelaku Usaha		10,000,000						
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			Persentase Alat UTTP yang Ditera / Tera Ulang dalam Tahun Berjalan; Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi terhadap Ketentuan yang Berlaku	94.00%; 5.00%		615,000,000						
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			Persentase Wajib Tera yang Terlayani / Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Tera dan Tera Ulang	94,37%		615,000,000						
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	25.000 Unit		447,000,000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Rincian :												
		Operasional Tera / Tera Ulang UTTP			Jumlah wajib tera yang terlayani	25.000 Unit		200,000,000						
		Dukungan Surveillance (Assesi)			Jumlah Dokumen Lolos dalam audit oleh kemendag,ISO 9001-2015 dan SMAP (ISO 37001-2016	3 Dokumen		57,000,000						
		Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemetrolgian			jumlah pengembangan sumber daya manusia (SDM)	13 Orang		190,000,000						
		Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	600 Pelaku Usaha		160,000,000						
		Rincian :												
		Pendataan / Pemetaan Data Potensi dan Kondisi UTTP dan BDKT			Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan / pemetaan alat ukur timbang dan BDKT	2 Kecamatan		50,000,000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Operasional Pengawasan UTTP			Jumlah UTTP yang dilakukan pengawasan pada masyarakat & pelaku usaha	800 UTTP		40,000,000						
		Penyuluhan kemetrologian melalui tatap muka, medis cetak, elektronika, internet			Jumlah pelaku usaha yang mendapat penyuluhan kemetrologian	100 pelaku usaha		30,000,000						
		operasional pengawasan BDKT			Jumlah Jenis Produk dalam pengawasan BDKT	9 Jenis Produk		30,000,000						
		Pembelian sampling BDKT			Jumlah Barang sampling BDKT	1 sampling		5,000,000						
		Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja pengawasan			Jumlah alat standart kerja	6 Unit alat standart		5,000,000						
		Penyidikan Metrologi Legal			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1 Unit		8,000,000						
		Rincian :												

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Operasionalisasi Penegakan Hukum			Proses pelimpahan perkara hasil pelanggaran pengawasan, terlaksananya pengawasan terhadap peraturan kemetrolgian	1 Kasus		8,000,000						
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			Persentase UMKM yang Berkembang Omzetnya	60%		45,000,000						
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			Persentase UMKM yang Berkembang Omzetnya	60%		45,000,000						
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota			Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	8 UMKM		45,000,000						
		Rincian :												
		Promosi Potensi Daerah			Jumlah Promosi potensi daerah yang diikuti	2 Kali		45,000,000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	-								
		Rincian :												
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			Tingkat Pertumbuhan Industri	2%		900,000,000						
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota			Persentase Peningkatan Produktivitas IKM	2%		900,000,000						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		100,000,000						
		Rincian :												
		Sosialisasi penerapan industri hijau bagi industri			Jumlah Industri yang mengikuti sosialisasi	15 Perusahaan		20,000,000						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Fasilitasi pendaftaran merk produk industri aneka dan tekstil			Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pendaftaran merk produk industri aneka dan tekstil	30 IKM		30,000,000						
		Fasilitasi standarisasi produk IKM Agrokim			Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi produk IKM Agrokim	60 IKM		50,000,000						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen		800,000,000						
		Rincian :												
		Bimbingan Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan IKM			Jumlah IKM yang mendapat bimbingan	25 IKM		85,000,000						
		DBHCHT - Kajian Pembentukan KIHT di Kab. Mojokerto			Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen		200,000,000						DBHCHT
		Pembinaan Pengusaha hasil tembakau di kab. Mojokerto			Jumlah Pengusaha Tembakau yang mendapatkan Pembinaan	40 Orang		50,000,000.00						
		Desiminasi standarisasi Produk Industri Agro Kimia			Jumlah IKM yang mengikuti desiminasi	70 Orang		50,000,000.00						
		Pendampingan Pengembangan usaha industri bagi Industri kecil dalam rangka IKM naik kelas			Jumlah IKM yang berlegalitas	15 IKM		100,000,000.00						
		Pembinaan, pelatihan dan pendampingan servis elektronik yang terampil & terpercaya secara online			Jumlah IKM yang dibina	20 IKM		50,000,000.00						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

	Pelatihan bimbingan manajemen usaha industri bagi IKM kuningan, perak & monel				Jumlah IKM yang dibina	30 IKM		40,000,000.00						
	Pembinaan, pelatihan dan pendampingan trend batik khas Mojokerto & ecoprint				Jumlah IKM yang dibina	20 IKM		<u>50,000,000.00</u>	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan, pelatihan dan kemasan produk IKM bagi aneka dan tekstil				Jumlah IKM yang dibina	30 IKM		60,000,000.00						
	Pembinaan dan pelatihan teknik Pemotretan barang hasil produksi editing foto, fideo yang berkualitas dan pemasaran online				Jumlah IKM yang dibina	30 IKM		40,000,000.00						
	Pembinaan Industri kecil hasil hutan				Jumlah IKM yang dibina	20 IKM		75,000,000.00						
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri				Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laport Data Industri	55%		70,000,000.00						
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				Persentase Industri yang Melaporkan ke SIINAS	55%		70,000,000.00						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKIndan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasab Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perzinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen		70,000,000.00						
		Rincian :						-						
		Pengawasan dan Pembinaan IKM di Wilayah Kabupaten Mojokerto			Jumlah pengawasan & pembinaan ke industri	70 Industri		70,000,000.00						
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	50%		85,000,000.00						
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota			Persentase Pengumpulan Data Industri berbasis Sistem Informasi	50%		85,000,000.00						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sisem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		85,000,000.00						
		Rincian :						-						
		Updating data industri Kabupaten Mojokerto			Jumlah industri yang terdata	4000 Industri		85,000,000.00						
		Jumlah Total						14,316,618,996						

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

RANKHIR RENJA DISPERINDAG KAB. MOJOKERTO TAHUN 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan secara singkat bahwa rumusan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 tersebut di arahkan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perindustrian dan Perdagangan serta mendukung pencapaian misi ke 2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yaitu *“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.”*

Tujuan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (Tiga) sasaran. Sasaran pertama adalah meningkatnya Daya Beli Masyarakat dengan indikator Indeks Daya Beli. Target yang harus dicapai pada Tahun 2023 adalah sebesar 0.789%. Guna mewujudkan tercapainya target indikator tersebut, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan .

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ini diarahkan untuk dapat , serta meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan . Program ini dilaksanakan oleh Bidang Bina Usaha Perdagangan. Adapun target indikator program yang ingin dicapai pada Tahun 2023 yaitu peningkatan persentase sarana distribusi perdagangan dengan target sebesar 93% dengan jumlah total kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 3.715.000.000 dan 2 (dua) kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten.

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini diarahkan untuk dapat serta meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program ini dilaksanakan oleh bidang usaha perdagangan ,adapun target indicator program tersebut pada tahun 2023 yaitu Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 29% dengan pendanaan anggaran sebesar Rp. 100.080.00 dan 1 (Satu) kegiatan bersumber dari dana APBD.

Untuk sasaran yang kedua adalah Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah dengan indicator persentase angka perdagangan dalam daerah (Ekspor) dengan target yang dicapai ditahun 2023 sebesar 5%, adapun sasaran kedua didukung dengan program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Ekspor ini diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi dengan menumbuhkan ekspor didalam negeri,Program ini didukung oleh bidang usaha perdagangan ditahun 2023 dengan indicator persentase pertumbuhan ekspor dengan pendanaan sebesar Rp. 70.000.000 dengan didukung 1 (satu) kegiatan.

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan ini diarahkan untuk meningkatnya ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitasi pemenuhan komitmen,program ini didukung oleh bidang usaha perdagangan ditahun 2023 dengan indicator tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitasi pemenuhan komitmen dengan pendanaan sebesar Rp. 10.000.000 dengan didukung 1 (satu) kegiatan.

3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ini diarahkan untuk meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program ini didukung oleh bidang usaha perdagangan ditahun 2023 dengan indicator persentase UMKM yang berkembang omzetnya dengan pendanaan sebesar Rp. 45.000.000 dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan.

4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Standarisasi dan Pemasaran Perlindungan Konsumen ini diarahkan untuk peningkatan standarisasi dan pemasaran perlindungan konsumen, program ini didukung oleh bidang metrologi legal ditahun 2023 dengan indicator persentase alat UTPP ditera-tera ulang dan persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku dengan pendanaan sebesar Rp. 615.000.000 dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan.

Untuk sasaran yang ketiga adalah Meningkatnya Produktivitas dan Daya saing dengan indicator persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik kelas dengan target yang dicapai ditahun 2023 sebesar 3%, adapun sasaran ketiga didukung dengan program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan pembangunan industri ini diarahkan untuk merencanakan dan mengembangkan pembangunan industry yang ada

dikabupaten mojokerto untuk kedepanya, program ini didukung oleh dua bidang meliputi bidang industry kimia & agro (IAK) dan industry logam,mesin,,alat transportasi dan elektronika (ILMATE) ditahun 2023 dengan indicator tingkat pertumbuhan industry dengan anggaran sebesar Rp.900.000.000.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri ini diarahkan

Program pengendalian izin usaha industry ini diarahkan untuk monitoring serta pengendalian dalam izin berusaha khususnya dibidang industry di wilayah kabupaten mojokerto,program ini didukung oleh satu bidang industry yaitu bidang industry agro & kimia (IAK) ditahun 2023 dengan indicator tingkat kepatuhan industry untuk tertib lapor data industry dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Program pengelolaan system informasi industry nasional (SIINAS) ini diarahkan untuk mengelola system informasi industry khususnya di wilayah kabupaten mojokerto ,program ini didukung oleh satu bidang industry yaitu bidang industry logam,mesin,alat transportasi dan elektronika (ILMATE) ditahun 2023 dengan indicator tingkat ketersediaan informasi industry secara lengkap & terkini dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000

BAB 5

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah 5 (lima) Tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Mojokerto serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun aksi plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) dalam rangka hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran tanggungjawab / tugas yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Dinas Perdagangan dan perindustrian ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Adapun yang perlu mendapatkan perhatian untuk menjadi program prioritas yakni adanya kebijakan nasional terkait penyusunan RPIK serta pengaruhnya ke depan terkait program/kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mendukung itu

Akhirnya, semoga Rencana KerjaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Mojokerto, Juni 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH. SH.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004